

Ratusan Desa di Kabupaten Pandeglang Nggak Bayar Iuran BPJS

Asep Ucu SN - PANDEGLANG.BERITATERBARU.CO.ID

Mar 30, 2023 - 11:45



PANDEGLANG - Kejaksaan Negeri ([Kejari](#)) [Pandeglang](#) melakukan pemanggilan kepada ratusan warga [Desa](#) di Kabupaten [Pandeglang](#) akibat menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan [Pandeglang](#), Lini Septiana mengungkapkan, bahwa kegiatan ini sehubungan dengan peningkatan dan kepatuhan atas peserta BPJS ketenagakerjaan dalam hal jaminan sosial

ketenagakerjaan.

"Jadi dari total desa yang kami undang ada 113 untuk hari ini diundang 51 kemudian yang hadir 26, dari 26 udah berkomitmen untuk melakukan pembayaran iuran," ungkapnya kepada [wartawan](#) di Kejari [Pandeglang](#), Rabu (29/3/2023).

Dikatakannya, bahwa mengingat pencairan dana desa sudah cair sejak tahun 2022 lalu akan tetapi masih ada iuran yang belum dibayarkan dari desa kepada BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

"Untuk total iuran yang ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan ini dari desa yang belum membayar mencapai Rp 500 juta. Kami sudah lakukan upaya pengiriman surat pemberitahuan penangguhan iuran, namun sampai Februari kemarin masih belum ada komitmen atau kepatuhannya," kata Lini

Ia melanjutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten [Pandeglang](#) untuk melimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri ([Kejari](#)) [Pandeglang](#).

"Dari koordinasi kami dengan dinas DPMPD kami sepakat untuk melimpahkan ke pihak Kejaksaan supaya mendapatkan hasil atau komitmen dari pihak desa untuk melunasi semua tagihan di BPJS Ketenagakerjaannya," ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri ([Kejari](#)) [Pandeglang](#), Rizal Jamaludin mengatakan, bahwa pihaknya membantu untuk BPJS Ketenagakerjaan terhadap desa yang memiliki tunggakan.

"Jadi kita disini membantu untuk BPJS Ketenagakerjaan terhadap desa-desa yang memiliki tunggakan supaya program-program strategis pemerintah bisa berjalan karena manfaatnya sangat besar sekali," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya memberikan batas waktu selama 14 hari untuk pihak desa dapat menyelesaikan tunggakannya kepada BPJS ketenagakerjaan.

"Kita panggil persuasif dahulu, nanti kita akan lihat secara keseluruhan apakah benar desa itu sudah memotong tetapi tidak disetorkan itu lain cerita, yah ini meminimalisir dan mengingatkan aparat desa," tandasnya. (SN)